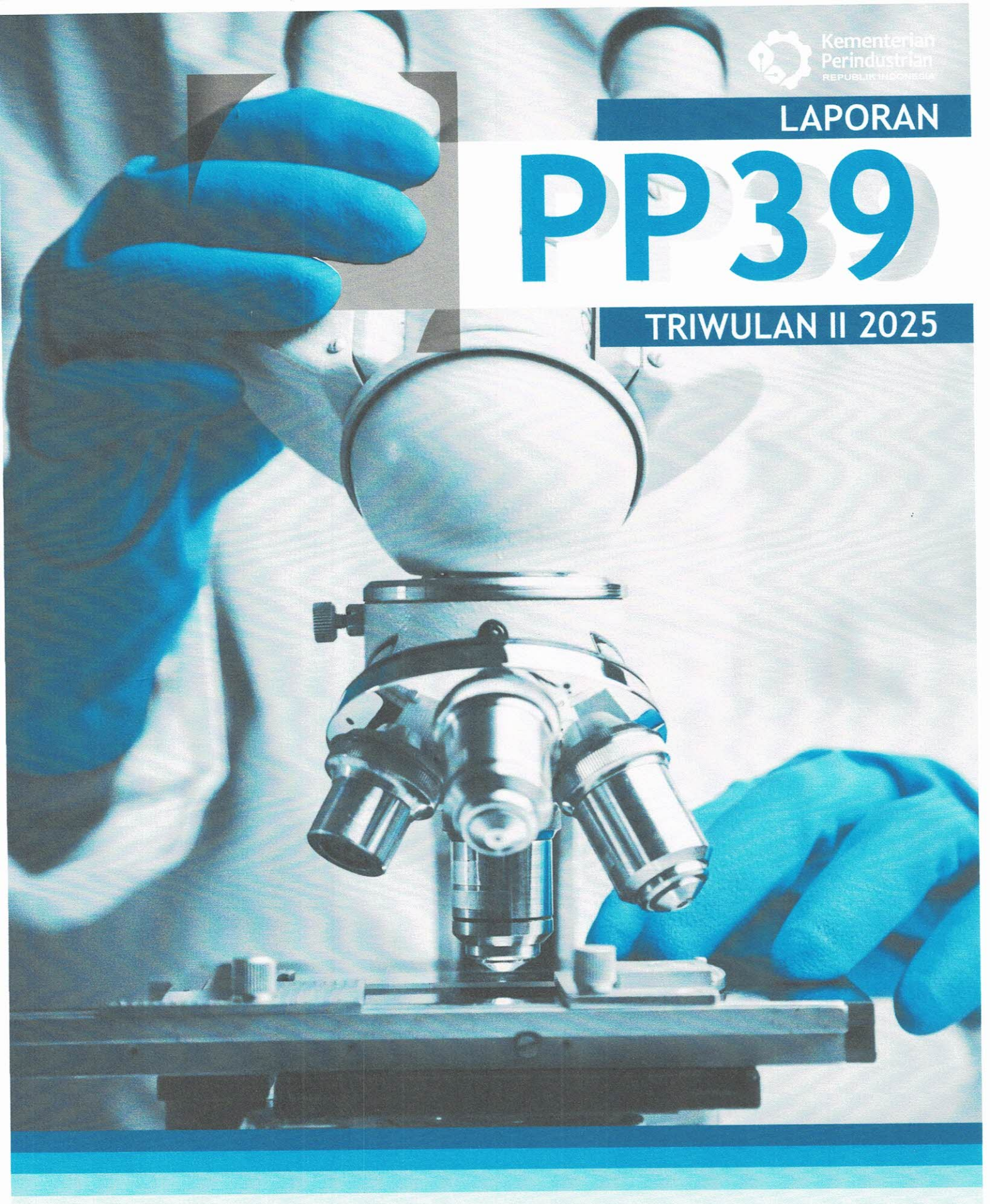

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PP39

## TRIWULAN II 2025


**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia
**T.** (024) 8316315, 8314312 **F.** (024)8414811 **HP.** 082134525006
**e.** bbspjppi.kemenperin@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II tahun 2025 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan II Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2025 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Juli 2025

Kepala BBSPJPPI

Dr. Sidik Herman

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

**Bab. I Pendahuluan** ..... 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 1

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program ..... 3

1.3. Struktur Organisasi ..... 4

**Bab. II Rencana Kegiatan** ..... 6

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2024 ..... 6

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ..... 15

**Bab. III Pelaksanaan Kegiatan** ..... 20

3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja ..... 20

3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja ..... 50

3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan ..... 98

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ..... 106

3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ..... 106

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan ..... 108

3.3. Langkah Tindak Lanjut ..... 108

3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja ..... 108

3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan ..... 110

**Bab. IV Penutup** ..... 111

4.1. Realisasi Kegiatan ..... 111

4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ..... 112

4.3. Saran dan Tindak Lanjut ..... 113

Lampiran 1: Form Rencana Aksi

Lampiran 3: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan II TA 2025

Lampiran 4: Tabel Monitoring Rincian Output April-Juni 2025 (Aplikasi Smart Kemenkeu)

Lampiran 5: APLIKASI EMONEV BAPPENAS TW II 2025

# BAB. I

# PENDAHULUAN

## 1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
c. Pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi

salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
- Penanganan Pencemaran;
- Pengujian Bahan dan Barang;
- Standardisasi Pengujian Mutu Produk.

b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi

c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
- Sertifikasi Sistem Mutu
- Sertifikasi Produk
- Sertifikasi Industri Hijau

d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis

e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
- Konsultasi Keteknikan
- Rancang Bangun dan Rekayasa

f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
- Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP

g Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal

h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

## 1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

   Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

   BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis

sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/ realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

## 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan , program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:

**Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPPI**

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

# BAB. II

# RENCANA KEGIATAN

## 2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah "*Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing*". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi "*Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*". Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

   Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementrian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

   BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNBP/BLU sebesar Rp 4.617.500.000. Pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan
d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.

   Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

e. Revisi ke-5 pada 17 April 2025, dengan pertimbangan revisi adalah pemutakhiran RPD Hal III DIPA.

Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPPI sd Triwulan II 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

f. Revisi ke-6 pada 27 Mei 2025, dengan pertimbangan revisi adalah relaksasi Blokir Kode A.

Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-

g. Revisi ke-7 pada 25 Juni 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2025

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan II |
|---|---|
| **Anggaran BBSPJPPI** | **36.159.131.000** |
| **Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri** | **12.659.906.000** |
| **1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri** | **12.659.906.000** |
| **KRO 1 :** Sosialisasi dan Diseminasi | 557.212.000 |
| **KRO 2 :** Pelayanan Publik Kepada Industri | 8.755.599.000 |
| **KRO 3** : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.347.095.000 |
| **Program Dukungan Manajemen** | **23.499.225.000** |
| **2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri** | **23.499.225.000** |
| **KRO 1 :** Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21.072.144.000 |
| **KRO 2 :** Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 |

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan II |
|---|---|
| **KRO 3 :** Layanan Manajemen SDM Internal | 700.524.000 |
| **KRO 4 :** Layanan Manajemen Kinerja Internal | 251.731.000 |

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan II | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Blokir | Efektif |
| **Anggaran BBSPJPPI** | **36.159.131.000** | **6.413.524.000** | **29.745.607.000** |
| **Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri** | **12.659.906.000** | **3.325.646.000** | **9.334.260.000** |
| **1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri** | **12.659.906.000** | **3.325.646.000** | **9.334.260.000** |
| **KRO 1 :** Sosialisasi dan Diseminasi | 557.212.000 | 273.802.000 | 283.410.000 |
| **KRO 2 :** Pelayanan Publik Kepada Industri | 8.755.599.000 | 1.290.119.000 | 7.465.480.000 |
| **KRO 3** : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.347.095.000 | 1.761.725.000 | 1.585.370.000 |
| **Program Dukungan Manajemen** | **23.499.225.000** | **3.087.878.000** | **20.411.347.000** |

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan II | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Blokir | Efektif |
| **2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri** | **23.499.225.000** | **3.087.878.000** | **20.411.347.000** |
| **KRO 1 :** Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21.072.144.000 | 1.472.024.000 | 19.600.120.000 |
| **KRO 2 :** Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 | 1.273.091.000 | 201.735.000 |
| **KRO 3 :** Layanan Manajemen SDM Internal | 700.524.000 | 294.006.000 | 406.518.000 |
| **KRO 4 :** Layanan Manajemen Kinerja Internal | 251.731.000 | 48.757.000 | 202.974.000 |

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

| No. | Kode | Klasifikasi Rincian Output | Anggaran (Rp.) | Anggaran Efektif (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6077.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 557.212.000 | 283.410.000 |
| 2 | 6077.BAD | Pelayanan Publik kepada Industri | 8.755.599.000 | 7.465.480.000 |
| 3 | 6077.CAH | Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.347.095.000 | 1.585.370.000 |
| 4 | 6042.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21.072.144.000 | 19.600.120.000 |

| No. | Kode | Klasifikasi Rincian Output | Anggaran (Rp.) | Anggaran Efektif (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6042.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 | 201.735.000 |
| 6 | 6042.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | 700.524.000 | 406.518.000 |
| 7 | 6042.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 251.731.000 | 202.974.000 |
| | | **Total** | **36.159.131.000** | **29.745.607.000** |

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-7 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | SD/CP |
|---|---|---|---|---|
| | | Awal | Efektif | |
| **EC** | **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** | **12.659.906.000** | **9.334.260.000** | |
| **6077** | **Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri** | **12.659.906.000** | **9.334.260.000** | |
| **6077.AEF** | **Sosialisasi dan Diseminasi** | **557.212.000** | **283.410.000** | |
| **013** | **Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri** | **557.212.000** | **283.410.000** | |
| **051** | **Sosialisasi Layanan Jasa Teknis** | **285.484.000** | **171.109.000** | **BLU** |
| A | Temu Pelanggan | 285.484.000 | 171.109.000 | |
| **052** | **Publikasi Layanan Jasa Teknis** | **271.728.000** | **112.301.000** | **BLU** |
| A | Promosi | 228,696,000 | 88.251.000 | |
| B | Pameran | 43.032.000 | 24.050.000 | |
| **6077.BAD** | **Pelayanan Publik Kepada Industri** | **8.755.599.000** | **7.465.480.000** | |
| **002** | **Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri** | **6.390.307.000** | **5.185.776.000** | |
| **051** | **Jasa Pelayanan Teknis Pengujian** | **6.200.577.000** | **5.125.340.000** | **BLU** |
| A | Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian | 2,227,752,000 | 1.210.752.000 | |
| B | Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran | 3,202,825,000 | 3.202.825.000 | |
| C | Layanan Pengujian Aneka Komoditi | 770,000,000 | 711.763.000 | |
| **052** | **Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian** | **189.730.000** | **60.436.000** | **BLU** |
| **022** | **Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri** | **524.236.000** | **475.736.000** | |
| **051** | **Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi** | **462.920.000** | **462.920.000** | **BLU** |

| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | SD/CP |
|---|---|---|---|---|
| | | Awal | Efektif | |
| A | Layanan Kalibrasi | 462.920.000 | 462.920.000 | |
| **052** | **Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi** | **61.316.000** | **12.816.000** | **BLU** |
| A | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi | 61.316.000 | 12.816.000 | |
| **034** | **Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri** | **940.140.000** | **940.140.000** | |
| **051** | **Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi** | **714.700.000** | **714.700.000** | **BLU** |
| A | Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu | 72.600.000 | 72.600.000 | |
| B | Layanan Sertifikasi Produk | 508.560.000 | 508.560.000 | |
| C | Layanan Sertifikasi Industri Hijau | 38.460.000 | 38.460.000 | |
| D | Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan | 14.160.000 | 14.160.000 | |
| E | Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal | 37.000.000 | 37.000.000 | |
| F | Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri | 43.920.000 | 43.920.000 | |
| **052** | **Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi** | **225.440.000** | **225.440.000** | **BLU** |
| A | Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi | 225.440.000 | 225.440.000 | |
| **055** | **Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri** | **217.110.000** | **217.110.000** | |
| **051** | **Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri** | **217.110.000** | **217.110.000** | **BLU** |
| A | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri | 217.110.000 | 217.110.000 | |
| **056** | **Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri** | **28.668.000** | **28.668.000** | |
| **051** | **Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri** | **28.668.000** | **28.668.000** | **BLU** |
| A | Layanan Verifikasi TKDN | 28.668.000 | 28.668.000 | |
| **057** | **Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri** | **462.382.000** | **462.382.000** | |
| **051** | **Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri** | **367.080.000** | **367.080.000** | **BLU** |
| A. | Konsultansi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek | 155.190.000 | 155.190.000 | |
| B | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 211.890.000 | 211.890.000 | |
| **052** | **Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri** | **95.302.000** | **95.302.000** | **BLU** |
| A. | Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri | 95.302.000 | 95.302.000 | |
| **096** | **Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri** | **155.668.000** | **155.668.000** | |
| **051** | **Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi** | **112.000.000** | **112.000.000** | **BLU** |
| A. | Penyelenggara Uji Profisiensi | 112.000.000 | 112.000.000 | |
| **052** | **Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji** | | | **BLU** |

| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | SD/CP |
|---|---|---|---|---|
| | | Awal | Efektif | |
| | **Profisiensi** | **43.668.000** | **43.668.000** | |
| A. | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi | 43.668.000 | 43.668.000 | |
| **6077.CAH** | **Sarana Bidang Industri dan Perdagangan** | **3.347.095.000** | **1.585.370.000** | |
| **013** | **Peralatan Fasilitas aboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri** | **3.347.095.000** | **1.585.370.000** | |
| **051** | **Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan** | **3.347.095.000** | **1.585.370.000** | **BLU** |
| A. | Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium | 3.347.095.000 | 1.585.370.000 | |
| **WA** | **Program Dukungan Manajemen** | **23.499.225.000** | **20.411.347.000** | |
| **6042** | **Pengelolaan Manajeman Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri** | **23.499.225.000** | **20.411.347.000** | |
| **6042.EBA** | **Layanan Dukungan Manajemen Internal** | **21.072.144.000** | **19.600.120.000** | |
| **958** | **Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi** | **333.528.000** | **103.528.000** | |
| **051** | **Pengelolaan Data dan Informasi** | **333.528.000** | **103.528.000** | **BLU** |
| A. | Pengelolaan Data dan Informasi | 333.528.000 | 103.528.000 | |
| **962** | **Layanan Umum** | **73.958.000** | **73.958.000** | |
| **051** | **Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga** | **73.958.000** | **73.958.000** | **BLU** |
| A. | Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga | 73.958.000 | 73.958.000 | |
| **994** | **Layanan Perkantoran** | **20.664.658.000** | **19.422.634.000** | |
| **001** | **Gaji dan Tunjangan** | **14.982.432.000** | **14.982.432.000** | **RM** |
| A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 14.647.771.000 | 14.647.771.000 | |
| B | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK | 334.661.000 | 334.661.000 | |
| **002** | **Operasional dan Pemeliharaan Kantor** | **5.682.226.000** | **4.440.202.000** | **RM/BLU** |
| A | Operasional Perkantoran dan Pimpinan | 3.191.858.000 | 2.187.201.000 | **RM/BLU** |
| B | Langganan Daya Dan Jasa | 916.200.000 | 732.638.000 | **RM/BLU** |
| C | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor | 717.570.000 | 717.570.000 | **RM/BLU** |
| D | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 271.540.000 | 217.735.000 | **RM/BLU** |
| E | Pemeliharaan Alat Laboratorium | 225.000.000 | 225.000.000 | **BLU** |
| F | Pemeliharaan Sarana Kantor | 106.258.000 | 106.258.000 | **RM/BLU** |
| G | Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh | 199.800.000 | 199.800.000 | **BLU** |
| H | Penyelenggaraan Poliklinik | 54.000.000 | 54.000.000 | **BLU** |
| **6042.EBB** | **Layanan Sarana Dan Prasarana Internal** | **1.474.826.000** | **201.735.000** | |
| **951** | **Layanan Sarana Internal** | **674.826.000** | **201.735.000** | |
| **051** | **Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional** | **35.000.000** | **0** | **RM** |
| **052** | **Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi** | 298.266.000 | 0 | **RM** |
| **053** | **Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran** | 341.560.000 | 201.735.000 | **BLU** |

| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | SD/CP |
|---|---|---|---|---|
| | | Awal | Efektif | |
| 971 | **Layanan Prasarana Internal** | **800.000.000** | **0** | |
| 051 | **Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan** | **800.000.000** | **0** | **BLU** |
| 6042.EBC | **Layanan Manajemen SDM Internal** | **700.524.000** | **406.518.000** | |
| 954 | **Layanan Manajemen SDM** | **256.252.000** | **53.188.000** | |
| 051 | **Pengelolaan/Manajemen SDM** | **256.252.000** | **53.188.000** | **RM/BLU** |
| 996 | **Layanan Pendidikan Dan Pelatihan** | **444.272.000** | **353.330.000** | |
| 051 | **Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM** | **444.272.000** | **353.330.000** | |
| A | Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN | 60.160.000 | 60.160.000 | **BLU** |
| B | Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional | 28.990.000 | 28.990.000 | **BLU** |
| C | Pendidikan Dan Pelatihan Teknis | 355.122.000 | 264.180.000 | **RM/BLU** |
| 6042.EBD | **Layanan Manajemen Kinerja Internal** | **251.731.000** | **202.974.000** | |
| 952 | **Layanan Perencanaan Dan Penganggaran** | **45.906.000** | **45.906.000** | |
| 051 | **Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran** | 45.906.000 | 45.906.000 | **BLU** |
| 953 | **Layanan Pemantauan dan Evaluasi** | **44.061.000** | **44.061.000** | |
| 051 | **Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi** | 44.061.000 | 44.061.000 | **BLU** |
| 955 | **Layanan Manajemen Keuangan** | **129.620.000** | **106.892.000** | |
| 051 | **Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan** | 129.620.000 | 106.892.000 | **RM/BLU** |
| 961 | **Layanan Reformasi Kinerja** | **32.144.000** | **6.115.000** | |
| 051 | **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP** | 32.144.000 | 6.115.000 | **BLU** |

## 2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

| Kode | Uraian Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 019.07.EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | | |
| 6077 | Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | 1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industriMigas | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri |
| | | 2.Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) |
| | | | 2. Nilai Net Promoter Score (NPS) |
| | | 3.Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
| | | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri |
| | | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) |
| | | | 4. Rasio Pendapatan |

| Kode | Uraian Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) |
| | | 4. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah |
| 019.07.WA | Program Dukungan Manajemen | | |
| 6042 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri | 1. Terwujudnya SDM yang Profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) |
| | | 2.Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker |
| | | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) |
| | | 3.Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1.Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI |
| | | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) |
| | | 4.Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker |
| | | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan |

| Kode | Uraian Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | Anggran IKPA |

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2025

| No. | Kode | Klasifikasi Rincian Output | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | 6077.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 150 Orang |
| 2 | 6077.BAD | Pelayanan Publik kepada Industri | 788 Industri |
| 3 | 6077.CAH | Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 38 Unit |
| 4 | 6042.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 3 Layanan |
| 5 | 6042.EBB | Layanan Sarana Dan Prasarana Internal | 91 Unit |
| 6 | 6042.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | 162 orang |
| 7 | 6042.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 8 dokumen |

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2025

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target | Satuan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,68 | indeks | IKU |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | 960 | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | IKU |
| 2. | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88 | Persen | Non IKU |
| | | 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 | Nilai | Non IKU |
| 3. | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. | Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27.71 | Persen | Non IKU |
| | | 2. | Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 | Hasil Layanan | Non IKU |
| | | 3. | Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14.50 | Persen | Non IKU |
| | | 4. | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54.22 | Persen | Non IKU |
| 4. | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81.30 | Indeks | Non IKU |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi | 20 | Persen | Non IKU |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target | Satuan | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pelayanan publik | | BSKJI | | | |
| | | 2 | Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80 | Persen | Non IKU |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4.62 | Indeks | Non IKU |
| 6. | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 | Persen | Non IKU |
| | | 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91.84 | Nilai | Non IKU |
| 7. | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 | Nilai | Non IKU |
| | | 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA | 94 | Nilai | Non IKU |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 53 | Persen | Non IKU |

# BAB. III

# PELAKSANAAN KEGIATAN

## 3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

**Tabel 8: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025**

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 indeks | 25% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I. | 50% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II. | 75% | 11] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III | 100% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instans | 25% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan | 50% | 1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin | 75% | 1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin | 100% | 1]Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I | | komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II | | komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III | | komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88 Persn | 25% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I. | 50% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. | 75% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III. | 100% | 11. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV.<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. | Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholis S), Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi (M. Eddy N) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 Nilai | 25% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I | 50% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II. | 75% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III. | 100% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27,71 persen | 25% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI. | 75% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI | 100% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II | | 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III. | | 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV. | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 Hasil Layanan | 25% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II. | 75% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III. | 10% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14,50 Persen | 25% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | 50% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | 75% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | 100% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54,22 Persen | 25% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 50% | 1] melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 75% | 1] melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 100% | 1] melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 indeks | 25% | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan | 50% | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan | 75% | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan | 100% | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan | Ketua Kelompok Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia ( Agung B) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | peningkatan kompetensi SDM TW I. | | bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II. | | bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III. | | bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV. | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 25% | 1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi<br>2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI | 50% | 1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.<br>2] Pengembangan Sistem Informasi<br>3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | 75% | 1] Uji Coba Integrasi Sistem<br>2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem<br>3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem | 100% | 1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem<br>2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi<br>3] Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem<br>4] Monitoring dan evaluasi | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80 Persen | 25% | 1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.<br>2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan.<br>3] Menyusun rencana | 50% | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 75% | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 100% | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi. | | | | | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 indeks | 25% | 1] Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDIi, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)<br>2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.<br>3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, | 50% | 1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2] Update website secara berkala<br>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh | 75% | 1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2] Update website secara berkala<br>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh | 100% | 1] Update website secara berkala<br>2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>4] Penyediaan | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | website) secara berkala.<br>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan<br>5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.<br>6] Penyebaran informasi | | masyarakat<br>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | | masyarakat<br>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | | informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | kapasitas layanan melalui media Kemenperin | | | | | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 Persen | 15% | 1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya<br>2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III | 40% | 1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | 85% | 1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja<br>2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen<br>3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil | 100% | 1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | pengawasan<br>4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan<br>5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91,84 nilai | 25% | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I<br>2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal | 50% | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II<br>2] Mempersiapkan data dukung dan mengupload di link yang telah disediakan | 75% | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III<br>2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta | 100% | ] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV<br>2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta<br>3] Tindak Lanjut hasil evaluasi penilaian | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 nilai | 30% | 1] Penyusunan dokumen Tapkin<br>2] Penyusunan dokumen Renkin<br>3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)<br>4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021<br>5] Koordinasi pelaksanaan | 60% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)<br>2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | 80% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) | 100% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP) | Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen | | | | | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA | 94 nilai | 25% | 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I<br>4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan | 50% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW II | 75% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW III | 100% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW IV | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | Desember 2025 |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu<br>6] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu | | | | | | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 53% | 30% | 1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan<br>2] Pengisian aplikasi P3DN<br>3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di | 50% | 1] Melakukan realiasasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. | 75% | 1] Melakukan realiasasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. | 100% | 1] Melakukan realiasasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. | Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum ( Sanyoto ) . | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | bawah 25%<br>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN | | Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri | | Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri | | Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri | | |

| No | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN | | berdasarkan tagging | | berdasarkan tagging | | berdasarkan tagging | | |

### 3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Progress realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin sampai dengan Triwulan II TA. 2025, terlihat pada tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9 : Realisasi Rencana Aksi per Triwulan II Tahun 2025**

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 indeks | 3,68 indeks | 100% | 50% | 50% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II | B.4:kuesioner yg Kembali 30 responden<br>B5:kuesioner Kembali 18 responden<br>B6: kuesioner yg Kembali 52 responden<br>• Tidak ada complain Bulan April-Juni,<br>• Perhitungan IKM per bulan |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 570 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 59,38% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi<br>B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha<br>B5: Jan-Mei 480 pelaku usaha<br>B6: Jan-Juni 570 pelaku usaha. |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II | |
| 2. | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88 Persen | 93,10 | 105,8 | 50% | 50% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian SPM Tw II:<br>B4:<br>Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order.<br>B5:<br>Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order.<br>B6:<br>Jumlah order Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order |
| | | 2. Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 nilai | 58 nilai | 145% | 50% | 50% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II | B4 - B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan |
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27,71% | 6,52% (penerimaan jan-juni 2025-penerimaan jan-juni | 23,53% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan | B4:<br>Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019<br>B5: |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | 2024 ) dibagi penerimaan jan-juni 2024 | | | | 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II. | Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914<br>B6:<br>Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591,486.461<br>Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,- |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7500 hasil layanan | 3471 layanan | 46,28% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | B4:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan.<br>B5:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan<br>B6:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14.50% | 5,85% | 40,34% | 50% | 50% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | B4-B6 :<br>1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025<br>2. melakukan pengesahan penerimaan April-Juni 2025.<br>3. Updating nilai buku asset satuan kerja. |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54,22 Persen | 49,19 % | 90,72% | 50 | 50 | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | B4-B6 :<br>1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025.<br>2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025. |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | . Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 indeks | 83,70 | 102,95 % | 50 | 50 | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan | B4-6 :<br>1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II.<br>2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BBSPJPPI.<br>3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II.<br>4.Evaluasi pelaksanaan peningkatan |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | kompetensi SDM TW II. | kompetensi SDM sampai TW II. |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 18 Persen | 90% | 50% | 50% | 1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.<br>2] Pengembangan Sistem Informasi<br>3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | B4:<br>Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI<br>B5:<br>Identifikasi perubahan manual API ver 4.0<br>B6:<br>Melakukan ujicoba konfigurasi modul SIPPI di SINDIi untuk integrasi data pengujian. |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80 Persen | 33,325% | 41,66% | 50% | 50% | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | B4:<br>Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE.<br>B5:<br>Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE.<br>B6:<br>Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin. |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4..62 indeks | Penilaian mandiri di akhir tahun | - | 50% | 50% | 1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2] Update website secara berkala<br>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat | B4-6 :<br>1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya.<br>2.Memutakhiran konten SIPPN dan website. |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | 3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan.<br>4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II.<br>5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos |
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 Persen | Belum ada jadwal audit satker | - | 40% | 40% | 1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | B4-B6:<br>1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024.<br>2.Koordinasi dengan tim pokja keuangan dan tim pokja umum terkit kelengkapan dkumen keuangan dan pengadaan. |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91,84 nilai | Belum ada jadwal penilaian arsip | - | 50% | 50% | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II.<br>2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan | B4-B6 .<br>1] Pengendalian Naskah Dinas:<br>• Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112<br>• Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369 |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | | 2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8<br>3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122<br>✓ Aktif : 546<br>✓ Inaktif : 105<br>✓ Dinamis : 201<br>4] Penyusutan Arsip:<br>• Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277<br>• Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103<br>5] Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 nilai | 83,6 | 101,95 % | 50% | 50% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)<br>2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | B4-6:<br>1.Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu<br>2.Updating data capaian perkin ,data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025<br>3.Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II.<br>4.Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024 |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA | 94 nilai | 100 nilai | 106,38 | 50% | 50% | 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | B4-B6:<br>1] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II.<br>2] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.<br>3] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III. |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 53 % | 44,37% (Data dari SAKTI) | 83,72% | 50% | 50% | 1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada | B4-B6:<br>1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.<br>2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI.<br>3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37% |

| No. | Tujuan/Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target Antara | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan )<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging. | |

## A. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 10.Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan II TA 2024

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 indeks | 3,68 | 100% | 50% | 50% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II | B4: kuesioner yg Kembali 30 responden<br>B5: kuesioner Kembali 18 responden<br>B6: kuesioner yg Kembali 52 responden<br>• Tidak ada complain Bulan April-Juni<br>• Perhitungan IKM setiap bulan |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 570 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 59,38% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi<br>B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha<br>B5: |

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II | Jan-Mei 480 pelaku usaha<br>B6:<br>Jan-Juni 570 pelaku usaha. |

Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja Tujuan, meliputi :

**1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Target kinerja IKM menggunakan skala indeks 1-4 dengan kuesioner yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan format Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017.

**a Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, BBSPJPPI setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan.

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan BBSPJPPI telah mengacu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan , saran dan masukan.

Responden dari survei ini adalah pengguna layanan BBSPJPPI, baik perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan jasa di BBSPJPPI dan dipilih secara acak.

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II

2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II

3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM TW II.

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1.Bulan April

1] Penyebaran kuesioner kepada 116 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 30 responden

2] Hasil analisa IKM bulan April berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,64 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan April sebesar 3,70.

2.Bulan Mei

1] Penyebaran kuesioner kepada 119 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 18 responden

2] Hasil analisa IKM bulan Mei berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,69 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Mei sebesar 3,70.

3.Bulan Juni

1] Penyebaran kuesioner kepada 122 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 52 responden.

2] Hasil analisa IKM bulan Juni berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,64 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Juni sebesar 3,68

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan I telah berhasil dilaksanakan.

**b Kendala**

Tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner IKM masih rendah. Hal ini ditandai dengan sulitnya mencari responden survey indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan II yang berkenan mengisi survey (mengembalikan kuesioner yang sudah disebar). Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

**c Rekomendasi**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah selalu meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas layanan agar capaian IKM sesuai target dan dapat meningkatkan partisipasi pelanggan dalam pengisian dan pengembalian kuesioner kepuasan pelanggan yang telah diisi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- Menyasar pelanggan yang dating ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner
- Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- Pada sistem SINDI pengisian kuesioner saat mengunduh LHU dibuat otomatis dan wajib.

**2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan II TA 2024 target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%. Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah

1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI

2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan

3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati

4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI

5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Juni 2025 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Juni berdasarkan data berikut :

Tabel 11 Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

| No | Jenis Layanan | Satuan | Realisasi Layanan |
|---|---|---|---|
| | | | Januari-Juni 2025 |
| 1 | Layanan Pengujian | Perusahaan/pelaku industri/instansi | 314 |
| 2 | Layanan Kalibrasi | | 24 |
| 3 | Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | | 6 |
| 4 | Layanan Sertifikasi | | 155 |
| 5 | Layanan Inspeksi Teknik | | 0 |
| 6 | Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek) | | 2 |

| No | Jenis Layanan | Satuan | Realisasi Layanan |
|---|---|---|---|
| | | | Januari-Juni 2025 |
| 7 | Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS) | | 1 |
| 8 | Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL) | | 1 |
| 9 | Layanan Verifikasi (TKDN, GRK) | | 17 |
| 10 | Layanan Pemeriksaan Produk Halal | | 10 |
| 11 | Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi | | 40 |
| 12 | Layanan Produsen Bahan Acuan | | 0 |
| 13 | Layanan lainnya | | 0 |
| | | **Total** | 570 |

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti penyelenggara uji profisisensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana perbaikan triwulan selanjutnya adalah :

1 Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
2 Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
3 Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
4 Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi.
5 Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI.
6 Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia

## B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 12 .Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan II TA 2025

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
| 1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) | 88 Persen | 93,10 | 105,8 | 50% | 50% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. | B4: Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order.<br>B5: Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order.<br>B6: Jumlah order |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
| | | | | | | | | Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. | Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order. |
| | | 2. Nilai *Net Promoter Score* (NPS) | 40 nilai | 58 nilai | 145% | 50% | 50% | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II | B4 - B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan |

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) **Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).**

   Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

( Σ Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM/ Σ Pelayanan yang diberikan) x 100%

**a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : " Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)" Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II.
5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan
6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

Tabel 13. Perhitungan SLA April -Juni 2025

| | **April** | | **Mei** | | **Juni** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Layanan** | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM |
| Layanan Pengujian | 498 | 497 | 541 | 541 | 270 | 264 |
| Layanan Kalibrasi | 11 | 11 | 26 | 26 | 14 | 14 |
| Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Layanan Sertifikasi | 5 | 5 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Layanan Inspeksi Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Layanan** | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM | Jumlah sampel/ transaksi/ Order | Sampel sesuai SPM |
| Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Verifikasi (TKDN, GRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Pemeriksaan Produk Halal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan Produsen Bahan Acuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layanan lainnya | | | | | | |
| Total | 515 | 514 | 587 | 587 | 306 | 300 |

Sehingga total order sampai TW II sebanyak 3.216 order dimana yang sesuai SPM sebesar 2.994 order sehingga rata -rata SLA TW II sebesar 93,10%

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala.**

Tidak ada kendala tetapi bisa ditingkatkan terkait sistem monitoring penyelesaian layanan yang belum semua layanan terintegrasi dengan SINDIi.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyelesaian layanan sd Triwulan II 2025 secara umum masih memenuhi target, namun tetap perlu dilakukan monitoring penyelesaian pekerjaan yang bisa dimonitoring melalui SINDIi.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

**2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai Net Promoter Score (NPS)**

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

***>Promoters* (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

***>Passives* (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

***>Detractors* (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$NPS$ = %Promoters − %Detractors

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

**a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Net Promotor Score (NPS) Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan

2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II. Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1.Bulan April :

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 116 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 30 responden, sehingga secara akumulatif sudah 67 responden dengan rincian promoters sebanyak 46 pelanggan, passives 21 pelanggan dan detractors 0 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan April 2025 adalah sebesar 69.

2.Bulan Mei

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 119 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 18 responden, sehingga secara akumulatif sudah 85 responden dengan rincian promoters sebanyak 59 pelanggan, passives 26 pelanggan dan detractors 0 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebesar 69.

3.Bulan Juni

- ✓ Penyebaran kuesioner kepada 122 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 52 responden, sehingga secara akumulatif sudah 137 responden dengan rincian promoters sebanyak 86 pelanggan, passives 44 pelanggan dan detractors 7 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebesar 58.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih sedikit dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu

penyebabnya karena pada sistem SINDI setelah perusahaan menunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah jumlah sampel kuesioner NPS yang diterima masih belum memenuhi/mencerminkan populasi jumlah pelanggan yang dilayani sd Triwulan II 2025 sehingga perlu dilakukan strategi untuk menghimpun pengisian kuesioner yang feedback/hasilnya dapat langsung diterima/kembali ke BBSPJPPI seperti misalnya dengan menyasar pelanggan yang datang langsung ke BBSPJPPI agar dapat langsung melakukan pengisian form kuesioner yang telah disampaikan petugas layanan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

- ✓ Dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran.
- ✓ Pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.

## C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 14.Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan II TA 2025

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
| 1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27,71 % | 6,52% (penerimaan jan-juni 2025-penerimaan jan-juni 2024 ) dibagi penerimaan | 23,53% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati | B4: Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019<br>B5: Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914<br>B6: Penerimaan PNBP |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
| | | | | jan-juni 2024 | | | | 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II. | BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591,486.461 Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,- |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7500 hasil layanan | 3471 layanan | 46,28% | 50% | 50% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | B4:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan.<br>B5:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan<br>B6:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan |
| | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14.50 % | 5,85% | 40,34% | 50% | 50% | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi | B4-B6 :<br>1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025<br>2. melakukan |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana Kegiatan | Realisasi Kegiatan |
| | | | | | | | | sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | pengesahan penerimaan April-Juni 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja. |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54,22 Persen | 49,19 % | 90,72% | 50 | 50 | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | B4-B6 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025. |

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. **Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**.

   Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.

   Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik

dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP

**a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran " 1. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)" Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI

2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan

3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati

4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.

5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
2. Membuat kontrak penawaran
3. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Triwulan Ⅱ
4. Penerimaan Januari – Juni 2025 sebesar Rp 7.591.486.461,- (40,63%) dari target Rp. 18.686.000.000,-

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b) Kendala**

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian masih terbatas.
4. Ruang lingkup layanan kalibrasi masih terbatas.
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.

6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.

**c) Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan peningkatan penerimaan PNBP dari seluruh layanan jasa BBSPJPPI (tidak hanya terpaku penerimaan dari layanan pengujian), perlunya monitoring setiap bulan pihak manajemen terkait kendala ataupun realisasi inovasi baik dari segi layanan, proses maupun penyelesaian keuangan terkait progres penagihan serta perlunya segera dilakukan peninjauan tarif BLU BBSPJPPI untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi untuk lingkup layanan baru BBSPJPPI (uji RATA, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal) dengan memanfaatkan media sosial balai maupun melalui partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pameran.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerima PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK ).
4. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

**2. Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.

2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP berbayar.

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan). Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi/ Kajian)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi

**a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Jumlah hasil layanan jasa industri. Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI

2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan

3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati

4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI

5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 3471layanan meliputi :

a) Pengujian = 3095 LHU

b) Kalibrasi = 157 LHU

c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 76 sertifikat/ laporan

d) Sertifikasi = 80 sertifikat/ hasil surveilen

e) Inspeksi Teknis = 0 laporan

f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 2 laporan

g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1

h) RBP (desain IPAL) = 1

i) Verifikasi TKDN = 46

j) LPH = 13

k) PUP = 0

l) PBA = 0

m) lainnya = 0

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b Kendala.**

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian

3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

**c Rekomendasi**

Evaluasi dari triwulan ini adalah

1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.
2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon
4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi
5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI
6. Mengoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia.

**3. Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai Revenue on Asset (RoA)**

Nilai Revenue on Asset (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja Sasaran Nilai Revenue on Asset (RoA). Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan April-Juni2025
2. Melakukan pengesahan penerimaan periode April-Juni 2025
3. Melakukan updating nilai buku aset satuan kerja April-Juni 2025

**b. Kendala.**

Nilai pendapatan masih dibawah target.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum seluruh aset tetap yang dimiliki khususnya aset bangunan dan mesin peralatan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan penerimaan PNBP.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya diantaranya dengan melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku asset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu. Disamping itu, untuk mendorong optimalisasi aset pada BLU BBSPJPPI dapat dijajaki pembentukan unit usaha BLU.

**4. Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)**

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

POBO = (Pendapatan Operasional / Biaya Operasional) x 100% Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan

PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Realisasi dari Indikator Kinerja " 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO). Pada Triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1] Melakukan monitoring penerimaan BLU

2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan II adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan April-Juni 2025.
2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode April-Juni 2025

**b. Kendala**

Nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurangi nilai pendapatan operasional.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

**D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional**

Tabel 15. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan II TA 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Terwujudnya SDM yang profesional | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81.30 Indeks | 83,70 | 102,95 % | 50 | 50 | 1 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk | B4-6 : 1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II. 2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BBSPJPPI. 3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II. 4.Evaluasi pelaksanaan |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II. | peningkatan kompetensi SDM sampai TW II. |

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

**1. Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pagawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah:

1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural

2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai

3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala

4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Monitoring Usulan Rencana Pelatihan dan Ketersediaan Anggaran 2025 sampai TW II
2. Pembaruan Data Pelatihan dan Pendidikan Pegawai

3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (Koordinasi dengan manajemen & pengelola keuangan terkait ketersediaan anggaran pelatihan Struktural dan Fungsional)
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi

Dari data diatas , maka indikator ini berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

1] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN

2] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait

3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang

4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dengan rencana pelatihan 2025 dan juga evaluasi nilai indeks profesionalitas ASN setiap periodik sehingga di akhir tahun dapat mencapai target perjakin yang ditetapkan.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah :

1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025

2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar

3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDMD

4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi

5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat

6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai

## E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 16. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan II TA 2024

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik ( % ) | | Kegiatan sampai Triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 18 Persen | 90% | 50% | 50% | 1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.<br>2] Pengembangan Sistem Informasi<br>3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | B4: Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI<br>B5: Identifikasi perubahan manual API ver 4.0<br>B6: Melakukan ujicoba konfigurasi modul SIPPI di SINDIi untuk integrasi data pengujian. |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80 Persen | 33,325% | 41,66% | 50% | 50% | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | B4: Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE.<br>B5: Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE.<br>B6: Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin. |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4..62 indeks | Penilaian mandiri di akhir tahun | - | 50% | 50% | 1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2] Update website secara berkala | B4-6 :<br>1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik ( % ) | | Kegiatan sampai Triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| | | | | | | | | 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | tahun sebelumnya.<br>2.Memutakhiran konten SIPPN dan website.<br>3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan.<br>4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II.<br>5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos |

Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1. **Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.**

   Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

   Cara menghitungnya adalah Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi.

   Adapun jenis layanan yang akan diintegrasikan meliputi pengujian, sertifikasi, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis, dan konsultansi.

   Integrasi yang dimaksud di atas adalah menggunakan metode *Application Programming Interface* (API).

Menjumlahkan jenis layanan di UPS BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI melalui API pada tahun ke-n dibagi dengan total jumlah jenis layanan yang akan diintegrasikan di UPT BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknsi, 2029 layanan konsultansi.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.
2. Pengembangan Sistem Informasi
3. Penyusunan SOP Penggunaan Sistem

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1.Bulan April

Melakukan koordinasi dengan tim pengembang integrasi data SIPPT BSKJI dengan penyesuian dokumentasi manual API versi 4.0.

2.Bulan Mei

Melakukan identifkasi perubahan manual API ver 4.0 dan menyusun desain proses integerasi data SIPPT untuk layanan pengujian dengan modul pengiriman data di SINDI.

3.Bulan Juni

Melakukan uji coba konfigurasi modul SIPPT di Sindi untuk integrasi data layanan pengujian.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

- ✓ Saat ini terdapat kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigrurasi di modul SINDI sehingga ujicoba belum berhasil dilakukan.

**c. Rekomendasi**

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Melakukan koordinasi dengan admin SIPPT BSJKI terkait kendala aksesibilitas server dan melakukan komunikasi dengan pihak developer SINDI dalam proses integrasi data layanan BBSPJPPI.

**2. Indikator Kinerja Sasaran 4.2. : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibutktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

**a) Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50% dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang
2. Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara tertata

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Melakukan pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE untuk indikator Tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.
2. Melakukan analisis data dukung LKE LKE penerapan SPBE untuk indikator Tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

3. Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE penerapan SPBE sesuai dengan revisi terbaru dari Pusdatin.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b) Kendala**

Belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal.

**c) Rekomendasi**

Melakukan koordinasi dengan admin SPBE Pusdatin tentang penjelasan bukti dukung sesuia dengan indikator penerarapan SPBE.

**3. Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi 50%.

Adapun rencana kegiatan triwulan II adalah

1. Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.
2. Update website secara berkala
3. Update Medsos secara berkala dan setiap saat
4. Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat.
5. Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan public.
6. Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- ✓ Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
- ✓ Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan

tersampaikan dengan baik dan benar

- ✓ Memutakhirkan konten SIPPN dan website
- ✓ Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
- ✓ Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan
- ✓ Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan
- ✓ Memutakhirkan bahan tayang cetak
- ✓ Monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik tanggal 30 Juni 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPJPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh LHU mandiri. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis sehingga belum bisa diterapkan

**c. Rekomendasi**

Dilakukan pembenahan modul di SINDII.

## F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan II TA 2025

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Reali Sasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 Persen | Belum ada jadwal audit satker | - | 40% | 40% | 1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | B4-B6:<br>1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024.<br>2.Koordinasi tim pokja keuangan dan tim pokja umum. |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91,84 nilai | Belum ada jadwal penilaian arsip | - | 50% | 50% | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II.<br>2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan | B4-B6 .<br>1] Pengendalian Naskah Dinas:<br>• Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk =112<br>• Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369<br>2]Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8<br>3]Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122<br>✓ Aktif : 546<br>✓ Inaktif : 105<br>✓ Dinamis : 201<br>4]Penyusutan Arsip:<br>• Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277<br>• Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103<br>5]Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil |

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. **Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**

   Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

   **a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

   Pada triwulan II TA 2025 target fisik dari indikator ini 40 % dengan realisasi 40 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II adalah:

   1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja

   Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

   1. Penyiapan kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen panganggaran TA 2024
   2. Koordinasi dengan Tim Pokja Keuangan terkait penyiapan dokumen administrasi pertanggung jawaban keuangan kegiatan tahun 2024
   3. Koordinasi dengan Tim Pokja Umum bagian pengadaan terkait penyiapan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa TA 2024

   Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

   **b. Kendala**

   Tidak ada kendala

   **c. Tindak Lanjut**

   Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan telah disampaikan oleh seluruh penanggung jawab kegiatan. Sementara itu, untuk jadawal pelaksanan audit kinerja tahun 2024 pada satker BBSPJPPI masih menunggu kepastian jadwal dari pihak Inspektorat III.

   Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban keuangan dan dokumen kelengkapan pengadaan barang jasa kegiatan tahun 2024 dalam rangka persiapan pelaksanaan audit kinerja dengan berkoordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Keuangan dan Kelompok Kerja Umum BBSPJPPI.

Untuk memastikan masing-masing penanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan tepat waktu, Tim Pokja Program Pelaporan akan melakukan monitoring progres penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala sebelum batas akhir waktu penyampaian.

**2. Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)**

Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh unit kearsipan dalam memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek tata kelola arsip, kepatuhan terhadap prosedur, serta efektivitas sistem kearsipan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi administrasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan arsip agar tetap tertib, aman, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II.

2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan II yaitu:

1] Pengendalian Naskah Dinas:

- Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112
- Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369

2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8

3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan Daftar Arsip) = 122

- ✓ Aktif = 546
- ✓ Inaktif = 105
- ✓ Dinamis = 201

4] Penyusutan Arsip:

- Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277
- Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103

5] Mengikuti diklat fungsional arsiparis terampil

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

1] Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.

2] Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya adalah perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI

## G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan II TA 2025

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Reali Sasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 nilai | 83,60 | 101.95 | 50% | 50% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)<br>2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | B4-6:<br>1.Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu<br>2.Updating data capaian perkin ,data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025<br>3.Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II.<br>4.Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024 |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan | 94 nilai | 100 nilai | 106,38% | 50% | 50% | 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] Melakukan monitoring dan | B4-B6:<br>1] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II.<br>2] Pengajuan usulan revisi |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Reali Sasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Anggran<br>IKPA | | | | | | evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3} Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.<br>3] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III. |

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. **Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker**

   Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

   Pada tahun 2025, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SAKIP 2024 dengan mengacu pada ketentuan PerMenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021.

   a. **Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

      Pelaksanaan rencana kegiatan yang mendukung pada upaya perwujudan akuntabilitas kinerja satker BBSPJPPI selama periode Triwulan II 2025 diantaranya melalui penyiapan dokumen pengukuran kinerja tahun berjalan, penyusunan dokumen perencanaan kinerja untuk mendukung proses penganggaran periode tahun berikutnya, proses pelaporan kinerja Triwulan II serta evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja periode tahun sebelumnya.

      Pada Triwulan I target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 60 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)

2] Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- Penyusunan dan penyampaian Laporan PP 39 Tw I tahun 2025 sesuai batas waktu
- Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin April-Juni 2025
- Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin bulan April-Juni 2025
- Pengisian dan updating data capaian kinerja bulan April-Juni 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas.
- Koordinasi dengan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat III terkait Laporan Hasil Evaluasi SAKIP satker BBSPJPPI tahun 2024
- Pengisian Form A PP 39 dan penyusunan draft Laporan PP 39 Tw II 2025
- Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP tahun 2024

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Dokumentasi pelaksanaan monev kinerja belum terdokumentasi dengan baik

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI telah dilakukan secara tepat waktu. Namun demikian terkait dengan kesiapan dalam rangka penilaian implementasi SAKIP masih didapati kendala menyangkut kelengkapan dokumen pelaksanaan monev kinerja serta dokumen pengukuran kinerja.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah melakukan inventarisasi dan pengarsipan atas bukti pelaksanan monev kinerja pada tahun berjalan sehingga memudahkan untuk proses penilaian SAKIP kedepannya. Terkait dengan penyampaian Laporan PP 39 TW II 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan.

Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP 2024, selanjutnya sesuai hasil LHE SAKIP satker BBSPJPPI tahun 2024 akan disusun rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh Tim evaluator Inspektorat Jenderal

2. **Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker**.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada Triwulan II target fisik dari indikator ini adalah 50 % dengan realisasi capaian sebesar 50 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan II meliputi:

1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA

2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja

3} Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan

4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait usulan Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan II 2025
- ✓ Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng. Pengesahan DIPA revisi pada 17 April 2025.
- ✓ Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI terkait usulan Rencana Penarikan Dana (RPD) sd Triwulan III 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II dimana pengusulan turut memuat usulan relaksasi blokir belanja modal. Mempertimbangkan belum adanya

kejelasan ketersediaan anggaran, maka belum dapat dipastikan rencana penarikan dana atas belanja modal yang masih terblokir di usulan pemutakhiran RPD Triwulan III 2025

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berkenaan dengan pemenuhan aspek penilaian IKPA terkait kualitas perencanaan anggaran, telah dilakukan proses pemutakhiran RPD hal III DIPA pada Triwulan II 2025 sesuai batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Rencana perbaikan untuk triwulan selanjutnya diantaranya:

✓ Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI terkait realisasi pengajuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II di lingkungan satker BSKJI

✓ Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw III 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan

## H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan II TA 2025

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Reali Sasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 53 % | 44,37% (Data dari SAKTI) | 83,72% | 50% | 50% | 1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan )<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan | B4-B6:<br>1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.<br>2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI.<br>3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37% |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Fisik (%) | | Kegiatan Sampai triwulan II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target | Reali Sasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | produk dalam negeri berdasarkan tagging. | |

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1. **Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah**

   Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama meliputi akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dan /atau akun BLU 525121,525154,525153, 537112, dan 537113.

   Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri ( $R_{P3DN}$ ) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

   a. **Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

      BBSPJPPI sebagai satker di bawah Kementerian Perindustrian berupaya dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

      Guna mendukung hal tersebut, telah disusun rencana kinerja yang mendukung pencapaian target penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BBPSJPPI tahun 2024.

      Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah sebagai berikut:

      1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

      2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan

3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI

4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan II yaitu:

1] Melakukan Pengadaan Meja Kubikal Isi 4 dengan menggunakan jasa IKM untuk meningkatkan KDN (Kandungan Dalam Negeri)

2] Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN.

3] Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri.

4] Pembayaran kontrak bulan Maret-Mei 2025 tenaga outsourchimg: Petugas Kebersihan, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi.

5] Pelaksanaan kontrak audit KAP

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPPI periode Januari-juni berdasarkan data tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI diperoleh data capaian sebesar 44,37 %.

Dari data di atas, maka indikator kinerja berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

1] Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.

2] Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pencapaian target realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah

1] Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.

2] Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

### 3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025 sampai dengan Triwulan II 2025, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Kegiatan pada Triwulan II TA. 2025 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 51,88 % sedangkan target capaian realisasi keuangan sebesar 51,19 %. Untuk capaian fisik yang ditetapkan BSKJI sebesar 55 % dengan capaian realisasi fisik TW II sebesar 49,42%. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

**a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan inspeksi teknis, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi serta fasilitasi dan pembinaan industri.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan inspeksi teknis), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20.Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

| KRO | RO | Pagu Efektif | % Realisasi Keuangan s/d Juni | TVRO | RVRO | Progres | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| AEF Sosialisasi dan Diseminasi | 013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri) | 283.410.000 | 4,36 | 150 orang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAD Pelayanan publik kepada industri Prasarana Internal | 002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri | 5.185.776.000 | 56,77 | 480 industri | 255industri | 49,98% | 37 | 8.33 | 36 | 8.33 | 24 | 8.33 |
| | 022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri | 475.736.000 | 0,40 | 30 industri | 18 industri | 49,98% | 3 | 8.33 | 3 | 8.33 | 3 | 8.33 |
| | 034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri | 940.140.000 | 20,78 | 240 industri | 133 industri | 49,98% | 19 | 8.33 | 14 | 8.33 | 23 | 8.33 |
| | 055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri | 217.110.000 | 16,82 | 5 industri | 4 industri | 49,98% | 1 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| | 056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri | 28.668.000 | 70.50 | 10 industri | 9 industri | 84% | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | 057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri | 462.382.000 | 7,19 | 8 industri | 5 industri | 49,98% | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| | 096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri | 155.668.000 | 0,96 | 15 industri | 7 industri | 49,98% | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 4 | 8.33 |
| CAH Sarana Bidang Industri dan | 013 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan | 1.585.370.000 | 88,31 | 38 unit | 2 unit | 55% | 2 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 |

| KRO | RO | Pagu Efektif | % Realisasi Keuangan s/d Juni | TVRO | RVRO | Progres | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| Perdagangan | Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | |
| Total | Target Keuangan BSKJI 51,19% | Rp. 9.334.260.000 | 49,76 % | | | | | | | | | |

( Sumber : Aplikasi SAKTI)

Sampai Triwulan II Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan sebesar 44,2% tidak mencapai target keuangan BSKJI.

**a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri memiliki 3 (tiga) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6077.AEF Sosialisasi dan Diseminasi

   Sampai Triwulan II, total realisasi keuangan 4,36%.

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya belum tercapai karena belum ada pelaksanaan kegiatan business gathering. Dimana rencana kegiatan tersebut akan dilakukan di triwulan III.

   Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

   - Pembuatan draft desain pemutakhiran company profile, brosur-brosur layanan.
   - Pembuatan jadwal konten media sosial
   - Pencetakan bahan-bahan promosi (company profile, brosur,dll) untuk bahan promosi dan pameran; pengunggahan e-book di media elektronik dan media online; pengunggahan konten media sosial secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.
   - Rekap pelanggan calon peserta BG.

2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada industri

   Sampai Triwulan II, total realisasi keuangan mencapai 43,30%.

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai dikarenakan dari target 788 industri sudah tercapai 431 industri yaitu sebesar 54,70 % ( dan itu lebih dari 50% dari target)

   Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah:

   - Pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama pemantauan lingkungan.

- Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel untuk pengujian air limbah, udara emisi, dan produk (dalam rangka penerbitan SPPT SNI).
- Pelaksanaan pengujian subkon untuk parameter pengujian yang belum dapat dilakukan di laboratorium BBSPJPPI
- Pengadaan bahan kimia, bahan penolong, sparepart untuk mendukung operasional layanan pengujian.
- Pelaksanaan audit sertifikasi dalam rangka penerbitan SPPT SNI, sertifikat industri hijau dan sertifikat sistem mutu, pelaksanaan layanan kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis SDM industri, serta supervisi dalam rangka pelaksanaan kerjasama optimalisasi pemanfaatan teknologi.

3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

   Sampai Triwulan II, realisasi keuangan sebesar 88,31%.

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya telah tercapai.

   Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah :

   - Pengadaan 2 alat yaitu portable high performance Zero air system dan portable gas calibrator.

**b) Kendala**

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi
   - Pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih proses perencanaan.
2. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
   - Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja ( Kode A ), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

**c) Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi persiapan pelaksanaan Business Gathering.
- Segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya

yang bersumber dari sumber anggaran PNBP BLU

- Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

**b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri**

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengakapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan ).

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

| KRO | RO | Pagu Efektif (Rp) | % Realisasi Keuangan s/d Juni | TVRO | RVRO | Progres | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen | 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 103.528.000 | 21,44 | 1 layanan | 0 | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |

| KRO | RO | Pagu Efektif (Rp) | % Realisasi Keuangan s/d Juni | TVRO | RVRO | Progres | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| Internal | (Layanan) | | | | | | | | | | | |
| | 962 - Layanan Umum | 73.958.000 | 0 | 1 layanan | 0 | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| | 994 - Layanan Perkantoran | 19.422.634.00 | 54,16 | 1 layanan | 0 | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 951 - Layanan Sarana Internal | 201.735.000 | 64,45 | 90 unit | 30 unit | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 10 |
| | 971 - Layanan Prasarana Internal | 0 | 0 | 1 unit | 0 | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| EBC Layanan Manajemen SDM Internal | 954 - Layanan Manajemen SDM | 53.188.000 | 1,50 | 107 orang | 54 orang | 49,98 | 9 | 8.33 | 9 | 8.33 | 9 | 8.33 |
| | 996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan | 353.330.000 | 12,35 | 55 orang | 48 orang | 52 | 0 | 8 | 4 | 20 | 1 | 8 |
| EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Industri | 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 45.906.000 | 0 | 2 dokumen | 1 | 49,98 | 1 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| | 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 44.061.000 | 0,68 | 2 dokumen | 1 dokumen | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 1 | 8.33 |

| KRO | RO | Pagu Efektif (Rp) | % Realisasi Keuangan s/d Juni | TVRO | RVRO | Progres | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 106.892.000 | 66,68 | 2 dokumen | 1 dokumen | 55,98 | 0 | 8.33 | 0 | 22,33 | 1 | 8.33 |
| | 961 - Layanan Reformasi Kinerja | 6.115.000 | 9,85 | 2 dokumen | 0 | 49,98 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 |
| Total | Target Keuangan 51,19% | Rp. 20.411.347.000 | 52,86 % | | | | | | | | | |

( Sumber Aplikasi Intranet )

Sampai Triwulan II total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 56,9% diatas dari target keuangan BSKJI.

**a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

   Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 53,79 % .

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah terlaksana tetapi pada capaian output diisi di akhir tahun (Desember).

   Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

   - Pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pembayaran biaya langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarpras perkantoran (gedung dan bangunan kantor, kendaraan operasional, alat laboratorium), pengadaan bahan makanan penambah daya tahan tubuh, penyelenggaraan poliklinik, pengelolaan jaringan data, Mapping Kebutuhan Sistem Informasi yg diperlukan tiap Bagian
   - Finalisasi Kebutuhan Sistem Informasi dan Perbaikan sistem yang sudah berjalan.

2. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

   Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 64,45%.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Pengadaan kursi kerja
- Pengadaan meja kubikal isi 4.

3. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

   Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 10,93%.

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya sudah tercapai

   Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

   - Koordinasi administrasi kepegawaian.
   - Menyusun Rencana Pelatihan Teknis 2025 dan Koordinasi dengan PIC penyelenggaraan Diklat
   - Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi AK3 Bekerja di Ketinggian & AK3 Ruang terbatas kerjasama dengan ESACO),narasumber workshop Bimtek Kearsipan kepegawaian.

4. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

   Sampai Triwulan II total realisasi keuangan sebesar 35,56%

   Untuk realisasi dan progress RO pada umumnya tercapai dikarenakan tercapai di semester I dan akhir tahun.

   Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

   - Percetakan dan penjilidan Laporan PP 39 TW I 2025.
   - Pelaksanaan audit laporan keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik
   - Perjalanan dinas dalam rangka workshop penyusunan laporan keuangan dan BMN

**b. Kendala**

1. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal
   - Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja ( Kode A ), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

**c. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antarunit maupun

peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak.Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

## 3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

### 3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Net Promoter Score (NPS) terdapat kendala dalam pengembalian kuesioner yang disebar jumlahnya sedikit dibanding kuesioner yang disebar.
b. Terkait dengan indikator kinerja Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan indikator Jumlah hasil layanan jasa industri terdapat kendala yaitu adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik Dinas LH maupun laboratorium kompetitor milik swasta, telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan, masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan
c. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan.
d. Terkait Indikator Kinerja Nilai Revenue on Asset (R0A) masih rendah dikarenakan penerimaan masih dibawah target.
e. Terkait Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional masih dibawah target karena nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurangi nilai pendapatan operasional.

f. Terkait dengan sasaran kegiatan Terwujudnya SDM yang profesional dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala yaitu belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN, belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait, Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang, Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)
g. Terkait dengan sasaran kegiatan Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik dengan indikator Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI terdapat kendala yaitu kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigrurasi di modul SINDI sehingga ujicoba belum berhasil dilakukan.
h. Terkait dengan indikator kinerja tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala dalam perhitungan simulasi LKE Tingkat Penerapan SPBE dimana belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal
i. Terkait dengan sasaran kegiatan Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien dengan indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat., tidak semua SDM yang terkait kearsipan memahami aplikasi srikandi khususnya untuk surat keluar.
j. Terkait dengan sasaran kegiatan Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri dengan indikator Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah terdapat kendala yaitu Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri serta Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

### 3.2.2.Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

   Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat kendala:

   - Pelaksanaan kegiatan Business Gathering masih proses perencanaan.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

   Terkait KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdapat kendala:

   - Realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja ( Kode A ), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

## 3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

### 3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja triwulan II TA 2025 yang utama selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Net Promoter Score (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran serta pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Untuk meningkatkan indikator kinerja jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri,persentase peningkatan PNBP dan jumlah hasil layanan jasa industri dengan meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK dan komersialisasi produk inovasi teknologi, meningkatkan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi dengan harga yang bersaing serta melakukan kunjungan/supervisi pelaksanaan layanan ke industri.
3. Terkait persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement dengan cara memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran operasional layanan pengujian agar turut dilakukan upaya pemeliharaan mesin peralatan berkala, evaluasi ketersediaan stock bahan kimia dan sparepart secara berkala serta pengaturan jadwal sampling bagi analis yang juga bertugas sebagai petugas PPC.

4. Terkait capaian Nilai Revenue on Asset (RoA) yaitu melakukan monitoring penerimaan dan updating nilai buku asset satuan kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu. Disamping itu, untuk mendorong optimalisasi aset pada BLU BBSPJPPI dapat dijajaki pembentukan unit usaha BLU
5. Terkait capaian POBO yang rendah untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi Pendapatan Diterima Di Muka ( PDDM ).
6. Terkait indikator kinerja IP ASN perlu mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi serta mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.
7. Terkait indikator kinerja Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI perlu dilakukan koordinasi dengan bagian pengembang sistem informasi pada Sekretariat BSKJI untuk kesiapan dan kebutuhan pelaksanaan integrasi sistem informasi.
8. Terkait indikator kinerja tingkat penerapan SPBE perlu dilakukan berkonsultansi dengan Pusdatin terkait pengisian LKE Tingkat Penerapan SPBE.
9. Terkait nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
10. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN serta Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend..

### 3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077).

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan ini adalah perlu dilakukan peninjauan ulang atas jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan sekaligus melakukan percepatan pertanggungjawaban keuangan atas realisasi kegiatan yang sudah dijalankan.

Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi awal untuk persiapan pelaksanaan Business Gathering terkait penunjukan panitia pelaksana, penentuan tema pelaksanaan kegiatan, rundown acara serta Narasumber pada pelaksanaan kegiatan

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian efisiensi anggaran, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana, dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional minimum BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antar unit maupun peningkatan intensitas pemeliharaan guna memperpanjang masa pakai. Di sisi lain, perlu dilakukan penundaan dan pembatalan terhadap paket-paket pengadaan yang dinilai tidak mendesak.

Segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya yang bersumber dari sumber anggaran PNBP BLU.

Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

# BAB. IV

# P E N U T U P

## 4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, capaian perjanjian kinerja telah berhasil memenuhi target yaitu indikator kinerja *"Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker"* dengan capaian nilai 83,60, melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,00. Selain itu indikator kinerja seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai SLA , nilai NPS dan nilai minimal IKPA menunjukkan sinyal positif (tercapai 50% di TW II) untuk mencapai target di akhir tahun. Sementara itu, beberapa indikator kinerja lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target karena sebagian kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan dan akan terus dimonitor pada triwulan berikutnya.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, selama Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan 7 (tujuh) kali revisi DIPA BBSPJPPI. Berdasarkan hasil revisi terakhir, total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 36.159.131.000,-, yang terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 17.473.131.000,- dan anggaran PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Namun, seiring dengan penetapan efisiensi melalui Nota Dinas BSKJI Nomor 105/BSKJI/PR/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, telah dilakukan blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi sebesar Rp. 6.589.339.000,-, yang terdiri dari efisiensi Rupiah Murni sebesar Rp. 1.917.839.000,- dan PNBP/BLU sebesar Rp. 4.671.500.000,-.Tetapi pada revisi 6 terjadi relaksasi blokir A untu layanan perkantoran sebesar Rp. 175.815.000,- Dengan demikian, pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp. 7.591.486.461,- atau sebesar 40,63% dari total target penerimaan PNBP tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Sementara itu, dari aspek kinerja penyerapan anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPI selama Januari-Juni mencapai Rp. 15.431.908.068,- atau sebesar 51,88 % dari total pagu anggaran efektif berdasarkan DIPA hasil revisi terakhir. Realisasi ini terdiri dari penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 9.099.802.187,- (57,85%) dan PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 6.332.105.881,- (45,18%). Capaian tersebut melampaui target penyerapan anggaran

yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu sebesar 51,19%. Adapun capaian fisik kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 49,42 % tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BSKJI yang sebesar 55%.

## 4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian fisik belum sejalan dengan penyerapan anggaran. Meskipun realisasi anggaran mencapai 51,88% dari total pagu efektif dan melampaui target BSKJI sebesar 51,19%, capaian fisik kegiatan hanya sebesar 49,42%, lebih rendah dari target sebesar 55%.

Salah satu faktor spesifik yang memengaruhi rendahnya capaian fisik adalah belum tercapainya indikator kinerja "rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker", yang baru terealisasi sebesar 40%. Rendahnya capaian fisik tersebut memang dikarenakan belum ada jadwal audit dari Inspektorat Jenderal III. Sementara itu, pada indikator kinerja lainnya, capaian fisik umumnya telah mencapai 50% atau lebih, sehingga indikator ini menjadi salah satu penentu turunnya rata-rata total realisasi fisik.

Selain itu realisasi penerimaan PNBP yang belum optimal di periode Triwulan II, berpengaruh terhadap rencana realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran PNBP BLU. Karena hal tersebut maka realisasi anggaran diutamakan untuk kegiatan kegiatan layanan dan bersifat mendesak dan membuat tingkat fleksibilitas realisasi anggaran rendah.

Di samping itu,realisasi belanja modal sd TW II masih terkendala ada blokir efisiensi belanja ( Kode A ), dimana pengajuan relaksasi tahap I atas blokir belanja modal tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Anggaran Kemenkeu.

## 4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian dan hambatan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2025, BBSPJPPI perlu menetapkan langkah-langkah percepatan dan penguatan koordinasi antar tim kerja kegiatan. Salah satu fokus utama adalah mendorong percepatan penyelesaian kegiatan yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, terutama yang output-nya belum sepenuhnya terekam sebagai capaian fisik.

Terkait dengan indikator kinerja tindak lanjut hasil pengawasan internal, BBSPJPPI disarankan untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan tim audit internal guna memastikan penjadwalan audit satker dapat dilakukan lebih awal pada triwulan berikutnya.

Terkait penerimaan PNBP yang belum optimal maka diupayakan peningkatan realisasi penerimaan PNBP melalui monitoring penagihan atas penyelesaian pekerjaan, mendorong realisasi layanan atas

pengembangan layanan baru ( verifikasi TKDN, uji profisiensi, kalibrasi lingkungan ) serta melakukan monitoring penyelesaian piutang jasa layanan.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, segera melakukan penjadwalan ulang atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan belanja modal yang belum terlaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber anggaran utamanya yang bersumber dari sumber anggaran PNBP BLU serta Mengantisipasi masih adanya belanja yang bersumber dari PNBP BLU yang diblokir, pemenuhan belanja operasional layanan akan diupayakan melalui pemanfaatan saldo awal kas BLU dengan merujuk pada ketentuan revisi DIPA BLU diatas pagu APBN selama masa efisiensi.

Secara keseluruhan, BBSPJPPI perlu menjaga keseimbangan antara kinerja keuangan dan kinerja output agar akuntabilitas pelaksanaan program tetap terjaga. Monitoring dan evaluasi triwulanan harus lebih difokuskan tidak hanya pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kecepatan pencapaian fisik dan kualitas pelaksanaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi fisik akan meningkat seiring dengan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya, serta target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

# LAMPIRAN

**RENCANA AKSI**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 Indeks | 25% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala<br>3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan<br>4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) | 50% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala<br>3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan<br>4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)<br>6] Pelaksanaan Temu Pelanggan untuk memperoleh umpan balik pelanggan | 75% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala<br>3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan<br>4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) | 100% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Pemantauan dan evaluasi capaian SPM secara berkala<br>3] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan<br>4] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>5] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK)<br>6] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan | Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) | Des-25 |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 25% | Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya | 50% | Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya | 75% | Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya | 100%% | Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Partisipasi pada kegiatan pameran/ temu pelanggan/ event lainnya | | |
| 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) | 88 Persen | 25% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>4. Membuat jadwal pengambilan sampel<br>5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel<br>6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi<br>7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM<br>8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi<br>9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi<br>11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien<br>12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan<br>13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM | 50% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>4. Membuat jadwal pengambilan sampel<br>5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel<br>6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi<br>7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM<br>8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi<br>9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi<br>11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien<br>12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan<br>13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM | 75% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>4. Membuat jadwal pengambilan sampel<br>5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel<br>6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi<br>7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM<br>8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi<br>9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi<br>11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien<br>12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan<br>13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM | 100% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa pengujian/ kalibrasi dari pelanggan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>4. Membuat jadwal pengambilan sampel<br>5. Melakukan kegiatan pengambilan sampel<br>6. Melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi<br>7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM<br>8. Melakukan review terhadap permohonan kegiatan sertifikasi dan verifikasi<br>9. Mengadakan/ mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi personil<br>10. Membuat jadwal kegiatan sertifikasi<br>11. Melakukan sertifikasi sesuai dengan kesepakatan waktu dengan klien<br>12. Melakukan komunikasi intensif dengan klien dan lab subkon apabila ada pengujian yang di subkontrakkan<br>13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM | Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholis S), Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi (M. Eddy N) | Des-25 |
| | | 2. Nilai *Net Promoter Score* (NPS) | 40 | 25% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) | 50% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) | 75% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) | 100% | 1] Penyelenggaraan pelayanan jasa teknis satu pintu<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) | Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) | Des-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27,71 | 25% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI | 50% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | 75% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) | Des-25 |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 Hasil Layanan | 25% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI | 50% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | 75% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5) Partisipasi pada kegiatan pameran | Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) | Des-25 |
| | | 3. Nilai *Revenue on Asset* (RoA) | 14,50 Persen | 25% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU | 50% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU | 75% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU | 100% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) | Des-25 |
| | | 4. Rasio Perdapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54,22 Persen | 25% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 50% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 75% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 100% | 1) melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2) melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) | Des-25 |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 indeks | 25% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM | 50% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM | 75% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM | 100% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM | Ketua Kelompok kerja Kepegawaian ( Agung B) | Des-25 |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 25% | 1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jer | 50% | 1) Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.<br>2) Pengembangan Sistem Informasi<br>3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | 75% | 1) Uji Coba Integrasi Sistem2) Sosialisasi dan Pelati | 100% | 1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem2) Per | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Des-25 |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80 Persen | 25% | 1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.<br>2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan.<br>3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi. | 50% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 75% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 100% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | | |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 indeks | 30% | 1) Penyusunan draft update SK Standar Pelayanan Publik, PPID, Promosi dan SINDII, SK Tim Humas, SK ZI dll (terkait layanan Publik)<br>2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.<br>3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.<br>4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan<br>5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.<br>6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin<br>7) Peningkatan kompetensi SDM pengampu layanan publik (bimtek/study banding) | 50% | 1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2) Update website secara berkala<br>3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | 75% | 1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2) Update website secara berkala<br>3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | 100% | 1) Update website secara berkala<br>2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 Persen | 15% | 1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya<br>2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III | 40% | 1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | 85% | 1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja<br>2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen<br>3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan<br>4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan<br>5] Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan | 100% | 1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | Des-25 |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91,84 | 25% | 1] Pembuatan daftar arsip aktif<br>2] Pembuatan daftar arsip alih media<br>3] Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax<br>4] Pemberkasan Arsip Aktif<br>5] Mengusulkan Arsip usul pindah<br>6] Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat<br>7] Pengajuan pemberkasan usul musnah<br>8] Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif<br>9] Penerimaan dan Pembuatan Arsip<br>10] Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta | 50% | 1] Pembuatan daftar arsip aktif<br>2] Pembuatan daftar arsip alih media<br>3] Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax<br>4] Pemberkasan Arsip Aktif<br>5] Mengusulkan Arsip usul pindah<br>6] Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat<br>7] Pengajuan pemberkasan usul musnah<br>8] Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif<br>9] Penerimaan dan Pembuatan Arsip<br>10] Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta | 75% | 1] Pembuatan daftar arsip aktif<br>2] Pembuatan daftar arsip alih media<br>3] Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax<br>4] Pemberkasan Arsip Aktif<br>5] Mengusulkan Arsip usul pindah<br>6] Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat<br>7] Pengajuan pemberkasan usul musnah<br>8] Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif<br>9] Penerimaan dan Pembuatan Arsip<br>10] Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta | 100% | 1] Pembuatan daftar arsip aktif<br>2] Pembuatan daftar arsip alih media<br>3] Mengelola surat masuk keluar melalui aplikasi SRIKANDI dan Intrafax<br>4] Pemberkasan Arsip Aktif<br>5] Mengusulkan Arsip usul pindah<br>6] Penomoran, verifikasi, klasifikasi surat<br>7] Pengajuan pemberkasan usul musnah<br>8] Mengklasifikasi peminjaman dokumen/berkas arsip aktif dan in aktif<br>9] Penerimaan dan Pembuatan Arsip<br>10] Persentase kegiatan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Des-25 |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 | 30% | 1] Penyusunan dokumen Tapkin<br>2] Penyusunan dokumen Renkin<br>3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)<br>4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021<br>5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Sas BSKJI dan Tim Itjen | 60% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)<br>2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | 80% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) | 100% | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP) | Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | Des-25 |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA | 94 | 25% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3] berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | 50% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3] berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | 75% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3] berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | 100% | 1] membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV<br>2] melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3] berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | | |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | 53 Persen | 30% | 1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan<br>2] Pengisian aplikasi P3DN<br>3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%<br>4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN | 50% | 1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN | 75% | 1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN | 100% | 1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN<br>3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN | Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum ( Sanyoto ) . | Des-25 |

Semarang, Januari 2025

Kepala BBSPJPPI

Sidik Herman

## REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN II TA. 2025

## SATKER BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | | Kendala | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab Tindak Lanjut | Target Penyelesaian Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 | 3,68 | 100% | 50 | 50 | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II<br>2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II<br>3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II | B.4:kuesioner yg Kembali 30 responden<br>B5:kuesioner Kembali 18 responden<br>B6: kuesioner yg Kembali 52 responden<br>• Tidak ada complain Bulan April-Juni,<br>• Perhitungan IKM per bulan | Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM. | Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Triwulan III |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan industri/pelaku usaha/instansi | 570 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 59,38 | 50 | 50 | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi<br>B4: Jan-April sebesar 344 pelaku usaha<br>B5: Jan-Mei 480 pelaku usaha<br>B6: Jan-Juni 570 pelaku usaha. | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah<br>2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian<br>3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan<br>4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan | 1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.<br>2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi<br>3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon<br>4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi<br>5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI<br>6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Triwulan III |
| 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88% | 93,10% | 105,8 | 50 | 50 | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan<br>2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi<br>3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II<br>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. | B4:<br>Jumlah order April sebesar 515 order dengan order yg sesuai SPM 514 order.<br>B5:<br>Jumlah order Mei sebesar 587 order dengan order yg sesuai SPM 587 order.<br>B6:<br>Jumlah order Juni sebesar 306 order dengan order yg sesuai SPM 300 order. | - | - | Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho ) | Triwulan III |
| | | 2. Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 | 58 | 145 | 50 | 50 | 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan<br>2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II | B4:<br>Jumlah responden jan-april sebesar 67 responden dengan promotor 46 responden.<br>B5: jumlah responden sampai Mei sebanyak 85 responden dengan jumlah promotor 59 responden.<br>B6: jumlah responden sampai juni 137 responden dengan promotor 86 responden. | Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey NPS. | Perlu dilakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang di share diberikan feedback yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menyasar pelanggan yang datang ke BBSPJPPI untuk langsung mengisi form kuesioner; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan dengan komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Triwulan III |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | | Kendala | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab Tindak Lanjut | Target Penyelesaian Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 27,71% | 6,52% | 23,53% | 50 | 50 | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II. | B4:<br>Penerimaan sampai Bulan April 2025 sebesar Rp. 6.127.471.019<br>B5:<br>Penerimaan sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp. 6.867.56.914<br>B6:<br>Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar Rp. 7.591,486.461<br>Dimana penerimaan sampai Juni 2024 sebesar Rp. 7.126.597.985,- | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah<br>2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian<br>3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan<br>4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan | 1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.<br>2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi<br>3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon<br>4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi<br>5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI<br>6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7500 hasil layanan | 3471 hasil layanan | 46,28 | 50 | 50 | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI<br>2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan<br>3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati<br>4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI<br>5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | B4:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai April 2024 sebesar 2379 hasil layanan.<br>B5:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Mei 2024 sebesar 3095 hasil layanan<br>B6:<br>Jumlah layanan jasa industri sampai Juni 2024 sebesar 3471 hasil layanan | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah<br>2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian<br>3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan<br>4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan | 1. Meningkatkan promosi dan peningkatan kualitas layanan.<br>2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi<br>3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon<br>4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi<br>5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI<br>6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Desember 2025 |
| | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14,50% | 5,85% | 40,34 | 50 | 50 | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU<br>3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | B4-B6 :<br>1.Melakukan monitoring penerimaan BLU April-Juni 2025<br>2. melakukan pengesahan penerimaan April-Juni 2025.<br>3. Updating nilai buku asset satuan kerja. | nilai pendapatan masih di bawah target | Meningkatkan pendapatan di triwulan selanjutnya | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam | Desember 2025 |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 54,22% | 49,19% | 90,72 | 50 | 50 | 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU<br>2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | B4-B6 :<br>1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan April-Juni 2025.<br>2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU April-Juni 2025. | nilai pendapatan operasional kumulatif di bulan Juni rendah, karena nilai Pendapatan Diterima Di Muka (PDDM) yang tinggi, dimana di LO PDDM ini mengurani nilai pendapatan operasional | segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam | Desember 2025 |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | | Kendala | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab Tindak Lanjut | Target Penyelesaian Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,3 | 83,7 | 102,95 | 50 | 50 | 1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural<br>2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai<br>3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala<br>4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II. | B4-6 :<br>1.Monitoring kesesuaian usulan rencana pelatihan 2025 TW II.<br>2. Fasilitasi diklat /pelatihan peningkatan kompetensi pegawai BBSPJPPI.<br>3.pengumpulan bukti sertifikat pelatihan peningkatan kompetensi sampai TW II.<br>4.Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM sampai TW II. | 1] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2025 dari LAN<br>2] Belum ada informasi jadwal penyelenggaraan Pelatihan Fungsional tahun 2025 dari Instansi Pembina yang dibutuhkan JF terkait<br>3] Efisiensi Anggaran tahun 2025 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM berkurang<br>4] Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot) | 1] Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025<br>2] Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar<br>3] Koordinasi lebih lanjut terkait jadwal dan usulan pelatihan PKN & PKA 2025 dengan Biro OSDMRB, Ses.BSKJI dan BPSDMD<br>4] Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi<br>5] Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat<br>6] Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai | Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia ( Agung B) | Triwulan III |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20% | 18% | 90% | 50 | 50 | 1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI.<br>2] Pengembangan Sistem Informasi<br>3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | B4:<br>Melakukan koordinasi integrasi data SIPPI BSKJI<br>B5:<br>Identifikasi perubahan manual API ver 4.0<br>B6:<br>Melakukan ujicoba konfigurasi modul SIPPI di SINDIi untuk integrasi data pengujian. | Saat ini terdapat kendala aksesibilitas di server SIPPT BSKJI dan perubahan konfigrurasi di modul SINDI sehingga ujicoba belum berhasil dilakukan | Melakukan koordinasi dengan admin SIPPT BSJKI terkait kendala aksesibilitas server dan melakukan komunikasi dengan pihak developer SINDI dalam proses integrasi data layanan BBSPJPPI | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Triwulan III |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 80% | 33,33% | 41,66% | 50 | 50 | 1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang<br>2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | B4:<br>Pengumpulan bukti dukung LKE penerapan SPBE.<br>B5:<br>Melakukan analisis data dukung LKE penerapan SPBE.<br>B6:<br>Melakukan penyusunan bukti dukung dan penilaian mandiri LKE sesuai form excel terbaru dari Pusdatin. | Belum adanya juknis pengisian LKE penerapan SPBE menyebabkan interpretasi penyediaan bukti dukung tidak optimal | Melakukan koordinasi dengan admin SPBE Pusdatin tentang penjelasan bukti dukung sesuia dengan indikator penerarapan SPBE | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Triwulan III |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 | Penilaian mandiri di akhir tahun | - | 50 | 50 | 1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDIi.<br>2] Update website secara berkala<br>3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat<br>4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat<br>5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik<br>6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASIS | B4-6 :<br>1.Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya.<br>2.Memutakhiran konten SIPPN dan website.<br>3.Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan.<br>4.Menindaklanjuti complain /saran/masukan pelanggan sampai TW II.<br>5.promosi kegiatan melalui podcast dan medsos | Saat ini telah diupayakan penyebaran kuesioner yang kembali ke BBSPJPPI melalui pengisian di sindii sebelum unduh LHU mandiri. Akan tetapi, masih terddapat kendala teknis sehingga belum bisa diterapkan | Dilakukan pembenahan modul di SINDII | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Triwulan III |
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 50 | Belum ada jadwal audit satker | - | 40 | 40 | Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | B4-B6:<br>1.koordinasi kelengkapan dokumen kinerja dan dokumen penganggaran 2024.<br>2.Koordinasi tim pokja keuangan dan tim pokja umum. | Tidak ada kendala | Menunggu jadwal pelaksanaan audit kinerja TA 2024 dari Tim Inspektorat III | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | Triwulan III |

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Target | Realisasi | Capaian | Sampai Triwulan II | | | | Kendala | Tindak Lanjut | Penanggung Jawab Tindak Lanjut | Target Penyelesaian Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % Fisik | | Kegiatan | | | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Rencana | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 91,84 | Belum terdapat jadwal penilaian pengawasan kearsipan internal dari Biro Umum. | - | 50 | 50 | 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II.<br>2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan | B4-B6 .<br>1] Pengendalian Naskah Dinas:<br>• Penciptaan & Registrasi Arsip Masuk = 112<br>• Penciptaan & registrasi Arsip Keluar = 369<br>2] Penggunaan Arsip (Pelayanan Peminjaman Arsip & Penyajian Arsip) = 8<br>3] Pemeliharaan Arsip (Penataan Arsip & Pembuatan<br>Daftar Arsip) = 122<br>Aktif : 546<br>Inaktif : 105<br>Dinamis : 201<br>4] Penyusutan Arsip:<br>• Pembuatan Daftar Usul Pindah = 277<br>• Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah = 103<br><br>5] Mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil | 1] Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk di Srikandi agak terlambat.<br>2] Anggaran yang terbatas untuk peningkatan kapabilitas SDM kearsipan | 1] Melaporkan ke Biro Umum sebagai UK 1.<br>2] Mengujukan penambahan anggaran dan mengikutsertakan BIMTEK untuk SDM yang terkait kearsipan. | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Desember 2025 |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 82 | 83,6 | 101,95 | 50 | 50 | 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II)<br>2]Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | B4-6:<br>1.Penyusunan dan penyampaian laporan PP 39 TW I sesuai batas waktu<br>2.Updating data capaian perkin ,data e monev bappenas dan data rencana aksi April-juni 2025<br>3.Penyusunan draft Laporan PP 39 TW II.<br>4.Penyusunan draft matriks tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2024 | Tidak ada kendala | Penyampaian Laporan PP 39 Tw II 2025 sebelum batas waktu yang ditentukan | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | Desember 2025 |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA | 94 | 100 | 106,38 | 50 | 50 | 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA<br>2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja<br>3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan<br>4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | B4-B6:<br>1] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan II.<br>2] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA TW II 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.<br>3] Koordinasi dengan tim pengelola terkait usulan RPD sd Triwulan III. | 1] Belum terdapat kejelasan pengajuan dan persetujuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II dimana pengusulan turut memuat usulan relaksasi blokir belanja modal. Mempertimbangkan belum adanya kejelasan ketersediaan anggaran, maka belum dapat dipastikan rencana penarikan dana atas belanja modal yang masih terblokir di usulan pemutakhiran RPD Triwulan III 2025 | 1] Koordinasi dengan Sekretariat BSKJI terkait realisasi pengajuan usulan relaksasi blokir kode A tahap II di lingkungan satker BSKJI<br>2] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw III 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sebelum batas waktu yang ditentukan | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | Desember 2025 |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 53 | 44,37 | 83,72 | 50 | 50 | 1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.<br>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan<br>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI (dikarenakan emon masih proses pembaharuan )<br>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging | B4-B6:<br>1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.<br>2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI.<br>3TKDN sampai TW II di aplikasi SAKTI sebesar 44,37% | 1] Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.<br>2] Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN. | 1] Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.<br>2] Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend. | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Desember 2025 |
| | | | | | | | | | | | | | |

..., Juli 2025
Kepala BBSPJPPI

Sidik Herman

| No. | Program | Kegiatan | KRO | RO | TVRO | RVRO | Progres | Januari | | Februari | | Maret | | April | | Mei | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres | RVRO | Progres |
| 1 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang) | 013 Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri (orang) | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 002 Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 480 | 252 | 49,98 | 88 | 8,33 | 41 | 8,33 | 26 | 8,33 | 37 | 8,33 | 36 | 8,33 | 24 | 8,33 |
| 3 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 022 Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 30 | 18 | 49,98 | 3 | 8,33 | 3 | 8,33 | 3 | 8,33 | 3 | 8,33 | 3 | 8,33 | 3 | 8,33 |
| 4 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 034 Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 240 | 133 | 49,98 | 35 | 8,33 | 29 | 8,33 | 13 | 8,33 | 19 | 8,33 | 14 | 8,33 | 23 | 8,33 |
| 5 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 055 Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 5 | 4 | 49,98 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 6 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 056 Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 10 | 9 | 84 | 2 | 8,33 | 4 | 8,33 | 3 | 58,34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 057 Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 8 | 5 | 49,98 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 8 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri) | 096 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri) | 15 | 7 | 49,98 | 0 | 8,33 | 1 | 8,33 | 0 | 8,33 | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 | 4 | 8,33 |
| 9 | EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Unit) | 013 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri (Unit) | 38 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan) | 1 | 0 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 11 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 962 Layanan Umum (Layanan) | 1 | 0 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 12 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit) | 994 Layanan Perkantoran (Layanan) | 1 | 0 | 50,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 9,33 |
| 13 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket) | 951 Layanan Sarana Internal (Unit) | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 10 |
| 14 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket) | 971 Layanan Prasarana Internal (Unit) | 1 | 0 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 15 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi) | 954 Layanan Manajemen SDM (Orang) | 107 | 54 | 49,98 | 9 | 8,33 | 9 | 8,33 | 9 | 8,33 | 9 | 8,33 | 9 | 8,33 | 9 | 8,33 |
| 16 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi) | 996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 55 | 48 | 52 | 41 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 20 | 1 | 8 |
| 17 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi) | 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen) | 2 | 1 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 1 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |
| 18 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi) | 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen) | 2 | 1 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 1 | 8,33 |
| 19 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi) | 955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen) | 2 | 1 | 55,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 22,33 | 1 | 0,33 |
| 20 | WA Program Dukungan Manajemen | 6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi) | 961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen) | 2 | 0 | 49,98 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 8,33 |

Kementerian PPN/ Bappenas

MONEV

TRIWULAN II

# 2025

# LAPORAN HASIL

## PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

**#247161**

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

# REKAP PELAPORAN KOMPONEN

## TRIWULAN II (KUMULATIF)

**Tahun** : 2025
**K/L** : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
**UK. Eselon I** : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri
**UK. Eselon II** : 16 - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK | | | FISIK Riil | ANGGARAN | | | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status | Keterangan | Progres | Satuan | Vol. | Real. | | Alokasi | Real. | % | | Kategori | Keterangan |
| **6042.EBA.958** - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **051** Pengelolaan Data dan Informasi | Pelaksanaan | update layanan SINDli | 40.00 | | 1 | 1 | | 333,528,000 | 22,200,000 | 6.66% | **Sudah** | Anggaran | anggaran masuk dalam proses efisiensi |
| **6042.EBA.962** - Layanan Umum | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **051** Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga | Persiapan | Pelayanan tata usaha Bulan Mei 2025 | 25.00 | Layanan | 1 | 0 | | 73,958,000 | 0 | 0.00% | Belum | Aparatur Pemerintahan (Internal) | Tidak ada masalah terkait hal tersebut |
| **6042.EBA.994** - Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **001** Gaji dan Tunjangan | Pelaksanaan | Pembayaran gaji dan tunjangan di Bulan Juni 2025 | 68.00 | | 1 | 6 | | 14,982,432,000 | 10,000,480,625 | 66.75% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah, semua menerima sesuai dengan waktunya |
| 4 | **002** Operasional dan Pemeliharaan Kantor | Pelaksanaan | Pembayaran layanan operasional dan perkantoran di Bulan Juni 2025 | 58.00 | | 1 | 4 | | 5,682,226,000 | 1,617,720,771 | 28.47% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah, semua sudah dibayarkan |
| **6042.EBB.951** - Layanan Sarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **052** Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | Pelaksanaan | Pembelian kursi 24 buah | 75.00 | | 29 | 24 | | 298,266,000 | 0 | 0.00% | **Sudah** | Barang / Material | sudah dilakukan pengadaan barang |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK | | | FISIK Riil | ANGGARAN | | | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status | Keterangan | Progres | Satuan | Vol. | Real. | | Alokasi | Real. | % | | Kategori | Keterangan |
| 6 | **053** Pengadaan peralatan inventaris perkantoran | Pelaksanaan | proses SPJan pengadaan barang | 58.00 | | 61 | 6 | | 341,560,000 | 130,027,176 | 38.07% | **Sudah** | Barang / Material | sudah diterima dengan baik |
| 7 | **051** Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional | Persiapan | anggaran masih dalam proses blokir | 25.00 | | 1 | 0 | | 35,000,000 | 0 | 0.00% | Belum | Anggaran | belum dapat dilaksanakan karena anggaran masih proses blokir |
| **6042.EBB.971** - Layanan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **051** Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan | Persiapan | masuk dalam anggaran blokir | 24.00 | | 1 | 0 | | 800,000,000 | 0 | 0.00% | Belum | Anggaran | anggaran masih proses blokir sehingga belum bisa dilaksanakan |
| **6042.EBC.954** - Layanan Manajemen SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **051** Pengelolaan/Manajemen SDM | Pelaksanaan | Fasilitasi menajemen SDM Bulan Juni 2025 | 68.00 | | 107 | 54 | | 256,252,000 | 800,000 | 0.31% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah terkait fasilitasi tersebut |
| **6042.EBC.996** - Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **051** Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM | Pelaksanaan | Pelatihan arsiparis terampil penyelia | 70.00 | | 55 | 48 | | 444,272,000 | 43,635,272 | 9.82% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Sudah dilaksanakan dan lulus |
| **6042.EBD.952** - Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | **051** Penyusunan Rencana Program dan Anggaran | Pelaksanaan | Pengerjaan revisi anggaran ke 7 | 43.00 | | 2 | 1 | | 45,906,000 | 0 | 0.00% | **Sudah** | Stakeholders Terkait (Eksternal) | Tidak ada masalah terkait revisi tersebut |
| **6042.EBD.953** - Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **051** Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | Pelaksanaan | Penyiapan draft laporan PP 39 TW II TA 2025 | 45.00 | | 2 | 1 | | 44,061,000 | 301,500 | 0.68% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah, proses persiapan draft laporan PP 39 TW II |
| **6042.EBD.955** - Layanan Manajemen Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK | | | FISIK Riil | ANGGARAN | | | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status | Keterangan | Progres | Satuan | Vol. | Real. | | Alokasi | Real. | % | | Kategori | Keterangan |
| 13 | **051** Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | Pelaksanaan | Penyiapan draft laporan keuangan semester I TA 2025 | 49.00 | | 2 | 1 | | 129,620,000 | 71,275,360 | 54.99% | **Sudah** | Penerima Manfaat | proses persiapan draft laporan keuangan semester I TA 2025 sesuai batas waktu yg ditentukan |
| **6042.EBD.961** - Layanan Reformasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **051** Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP | Pelaksanaan | Persiapan data untuk laporan SPIP dan zona integritas | 42.00 | | 2 | 0 | | 32,144,000 | 602,399 | 1.87% | Belum | Anggaran | sampai semester I belum membutuhkan anggaran dikarenakan masih penyiapan data dukung |
| **6077.AEF.013** - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **051** Sosialisasi Layanan Jasa Teknis | Persiapan | persiapan terkait tema acara | 24.00 | orang | 150 | 0 | | 285,484,000 | 0 | 0.00% | Belum | Anggaran | masih diefisiensi terkait penyelenggaraan acara tersebut |
| 16 | **052** Publikasi Layanan Jasa Teknis | Pelaksanaan | Promosi layanan BBSPJPPI di Bulan Juni 2025 | 49.00 | Kegiatan | 1 | 3 | | 271,728,000 | 12,368,987 | 4.55% | **Sudah** | Anggaran | Tidak ada masalah, lebih ke promosi media sosial atau melalui podcast |
| **6077.BAD.002** - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **051** Jasa Pelayanan Teknis Pengujian | Pelaksanaan | Layanan jasa pengujian Bulan Juni 2025 | 60.00 | Industri | 480 | 252 | | 6,200,577,000 | 2,943,846,632 | 47.48% | **Sudah** | Anggaran | Tidak ada masalah terkait pemberian layanan |
| 18 | **052** Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian | Persiapan | Persiapan data dukung proses akreditasi laboratorium pengujian | 24.00 | Akreditasi | 1 | 0 | | 189,730,000 | 0 | 0.00% | Belum | Anggaran | Tidak ada masalah |
| **6077.BAD.022** - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK | | | FISIK Riil | ANGGARAN | | | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status | Keterangan | Progres | Satuan | Vol. | Real. | | Alokasi | Real. | % | | Kategori | Keterangan |
| 19 | **051**<br>Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi | Pelaksanaan | Memberikan layanan jasa pengujian kalibrasi Bulan Juni 2025 | 64.00 | Industri | 30 | 18 | | 462,920,000 | 1,910,000 | 0.41% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah , klien terlayani dan tidak ada komplain |
| 20 | **052**<br>Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi | Persiapan | Persiapan data dukung surveilen akreditasi kalibrasi | 25.00 | Akreditasi | 1 | 0 | | 61,316,000 | 0 | 0.00% | Belum | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah ,semua terlayani dengan baik |
| **6077.BAD.034** - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | **052**<br>Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi | Persiapan | Persiapan data dukung akreditasi sertifikasi | 25.00 | Akreditasi | 1 | 0 | | 262,528,000 | 6,000,000 | 2.29% | Belum | Stakeholders Terkait (Eksternal) | proses menunggu jadwal pelaksanaan akreditasi sertifikasi |
| 22 | **051**<br>Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi | Pelaksanaan | Melakukan layanan sertifikasi Bulan Juni 2025 | 71.00 | Industri | 240 | 133 | | 714,700,000 | 189,365,700 | 26.50% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah terkait pelanggan yg terlayani |
| **6077.BAD.055** - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **051**<br>Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri | Pelaksanaan | pelaksanaan layanan optek yang sudah berjalan | 62.00 | industri | 5 | 4 | | 217,110,000 | 36,516,218 | 16.82% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Dalam proses layanan optek pelanggan |
| **6077.BAD.056** - Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | **051**<br>Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri | Pelaksanaan | Melakukan layanan TKDN pelanggan Bulan Juni 2025 | 61.00 | Industri | 10 | 9 | | 28,668,000 | 20,212,000 | 70.50% | **Sudah** | Penerima Manfaat | proses layanan TKDN Bulan Juni 2025 |
| **6077.BAD.057** - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | NOMENKELATUR KOMPONEN | STATUS PELAKSANAAN | | | FISIK | | | FISIK Riil | ANGGARAN | | | Status Kemanfaatan | PERMASALAHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Status | Keterangan | Progres | Satuan | Vol. | Real. | | Alokasi | Real. | % | | Kategori | Keterangan |
| 25 | **051**<br>Layanan Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | Pelaksanaan | -layanan konsultansi dengan klien GEC ( green environesia cendikia ) | 59.00 | Industri | 4 | 2 | | 367,080,000 | 33,264,900 | 9.06% | **Sudah** | Penerima Manfaat | proses konsultansi optek |
| 26 | **052**<br>Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri | Pelaksanaan | -melanjutkan layanan kolaborasi di PT Saprotan dan Kievit | 68.00 | Industri | 4 | 2 | | 95,302,000 | 0 | 0.00% | **Sudah** | Penerima Manfaat | proses layanan optek dengan klien tersebut |
| **6077.BAD.096** - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **051**<br>Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi | Persiapan | masih persiapan uji profisiensi tahap pertama | 25.00 | Industri | 15 | 0 | | 112,000,000 | 0 | 0.00% | Belum | Desain Perencanaan / Konsep | Belum terlaksana uji profisiensi tersebut |
| 28 | **052**<br>Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi | Pelaksanaan | sudah terbit sertifikat uji profisiensi | 90.00 | Akreditasi | 1 | 1 | | 43,668,000 | 1,500,000 | 3.44% | **Sudah** | Penerima Manfaat | Tidak ada masalah jika akan menyelenggarakan uji profisiensi |
| **6077.CAH.013** - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | **051**<br>Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan | Pelaksanaan | proses pengadaan untuk selanjutnya | 46.00 | Unit | 38 | 2 | | 3,347,095,000 | 1,400,000,000 | 41.83% | **Sudah** | Anggaran | anggaran masih proses blokir sehingga perlu koordinasi dengan pusat terkait pengadaan barang yg lain |

# LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

**Dr. Sidik Herman**

Kementerian PPN/ Bappenas

MONEV PENGENDALIAN

2025

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas